



**PERENCANAAN STRATEGIK
DALAM MENYIAPKAN SUMBER DAYA
APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH
YANG PROFESIONAL**

**DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI ERA DIGITAL 4.0**



A. Junaedi Karso

PERENCANAAN STRATEGIK
DALAM MENYIAPKAN SUMBER DAYA
APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH
YANG PROFESIONAL

DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI ERA DIGITAL 4.0

E-Government 4.0 merupakan salah satu komponen dari government merupakan salah satu sektor dalam proses governance. E-Gov mengarah pada transformasi produksi, logistik, komunikasi, dan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan inovatif perlu menciptakan nilai dari digitalisasi, perangkat pintar yang terhubung, dan membangun cara komunikasi dan kolaborasi Industri 4.0 tentang daya saing dan inovasi di pemerintahan (governance) dalam rangka pelayanan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu melaksanakan proses pembuatan kebijakan (perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik) serta menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, governance diterjemahkan menjadi tata kelola pemerintahan, yaitu bagaimana para aktor formal maupun informal menggunakan wewenang guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

Aktor dalam e-Government secara sederhana dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama yaitu sektor publik sebagai penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari eksekutif (departemen keuangan, pendidikan, kesehatan dsb), yudikatif dan legislatif pada level nasional, regional dan lokal. Aktor kedua disebut end-user, menurut konsep governance diatas end-user terdiri dari sektor non-pemerintah dan sektor privat yang berinteraksi di lima level governance. Pemanfaatan E-Gov Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, yang dimaksud e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance.

Adapun Pengembangan E-Government di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- 1). Level I merupakan tingkat persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
- 2). Level II merupakan tingkat pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain.
- 3). Level III tingkat pemantapan yang berisi pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
- 4). Level IV adalah tingkat pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C) dan Government to Employes (G2E) .

**PERENCANAAN STRATEGIK DALAM
MENYIAPKAN SUMBER DAYA
APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH
YANG PROFESIONAL DALAM
MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL 4.0**

A. Junaedi Karso



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PERENCANAAN STRATEGIK DALAM MENYIAPKAN
SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH
YANG PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA
DIGITAL 4.0**

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5896-48-9

NO HKI : EC00202201774

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “PERENCANAAN STRATEGIK DALAM MENYIAPKAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHN DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0”.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait “PERENCANAAN STRATEGIK DALAM MENYIAPKAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHN DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0”. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PERENCANAAN STRATEGIK	1
A. Rencana Strategik.....	1
B. Pengertian Strategi dan Konsep Perencanaan Strategik.....	2
C. Perencanaan Strategik di Era Otonomi Daerah.....	4
D. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ...	8
E. Kesimpulan.....	9
F. Daftar Pustaka	10
BAB 2 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN PEMANFAATAN ELECTRONIC GOVERNMENT	12
A. Pemerintahan.....	12
1. Ilmu Pemerintahan.....	17
2. Tujuan dan Tugas Umum Pemerintahan	18
3. Sistem Pembagian Kekuasaan.....	20
B. Implementasi Kebijakan.....	24
C. Pelayanan Publik.....	29
D. Penerapan Prinsip Good Governance	38
E. Pemanfaatan Electronic Government.....	41
F. Daftar Pustaka	45
BAB 3 PEMERINTAH DIGITAL	47
A. E-Government	47
B. Manfaat E-Government.....	51
C. Pelaksanaan E-Government.....	52
D. Perkembangan Pedoman dan Regulasi E-Government di Indonesia.....	53
E. Kendala E-Government	57
F. Daftar Pustaka	57
BAB 4 MEMAHAMI KONSEP E-GOVERNANCE SERTA HUBUNGANNYA DENGAN E-GOVERNMENT DAN E-DEMOKRAS, PENERAPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH	59
A. E-Governance dan Governance.....	59

B. Perkembangan Konsep Governance Dari Era 'Government' Menuju Era 'Governance'	61
C. Demokrasi Partisipasi Dalam Proses Governance	66
D. Framework E-Governance.....	68
E. Framework E-Government Fungsi Internal Dan Eksternal Dari E-Government	70
F. Framework E-Demokrasi : Partisipasi Secara Elektronik....	71
G. Hubungan Antara E-Governance, E-Government Dan E- Demokrasi	72
H. Kota di Indonesia yang Telah Menerapkan e-Government.....	72
1. Surabaya	73
2. Bojonegoro	74
3. Binjai.....	75
4. Bandung.....	75
5. Yogyakarta.....	76
I. Penerapan Electronic Government dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah.....	77
J. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik	79
K. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah	79
L. Tinjauan Tentang Konsep Electronic Government.....	80
M. Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah.....	82
N. Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government.	85
O. Kesimpulan	88
P. Daftar Pustaka.....	89
BAB 5 ASPEK PEMERINTAHAN DAN PERUBAHAN KOMPREHENSIF ERA DIGITAL	93
A. Aspek Pemerintahan di Era Digital	93
B. Beberapa Perubahan Penting Yang Mempengaruhi Pemerintahan.....	95
C. <i>E-Government</i> Sebagai Strategi dalam Meminimalisasi Penyebaran Covid-19 dan Efektivitas Pelayanan Publik...	112
D. Strategi Pelayanan Publik di Tengah Kondisi Wabah COVID-19.....	114
E. <i>Work From Home</i> , Pelayanan Publik Masa Covid-19.....	116
F. Daftar Pustaka.....	125

BAB 6	MODEL KEPEMIMPINAN DIGITAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	129
A.	Kepemimpinan.....	129
B.	Kualitas Pemimpin.....	130
1.	Inovatif dan Percaya Diri	130
2.	Menghargai Orang Lain.....	130
3.	Etika	130
4.	Sopan.....	131
C.	Revolusi Industri 4.0.....	131
D.	Model Kepemimpinan Militer	135
E.	Kesimpulan.....	146
F.	Daftar Pustaka	147
BAB 7	KONSEP PELAYANAN PUBLIK MENURUT ISLAM	149
A.	Pelayanan Publik.....	149
B.	Pengertian Pelayanan Publik	154
C.	Azas Pelayanan Publik	156
D.	Pendekatan Pelayanan Publik dalam Islam.....	159
E.	Pola Kerja menurut Islam.....	167
F.	Kesimpulan.....	171
BAB 8	PENYIAPAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	174
A.	Kualitas Pelayanan Publik.....	174
B.	Kualitas Pelayanan Publik.....	177
C.	Faktor Sumber Daya Manusia Pendukung Pelayanan Publik.....	181
D.	Penyiapan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah Yang Profesional Sebagai Pelaksana Pelayanan Publik....	183
E.	Kesimpulan.....	190
F.	Daftar Pustaka	190
BAB 9	DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK	193
A.	Konsep dan Makna Kebijakan	193
B.	Urgensi Kebijakan Publik.....	196
C.	Kebijakan Publik dan Opini Publik.....	200
D.	Ciri dan Jenis Kebijakan Publik	203
E.	Dilema Kebijakan Publik.....	208

F. Kerangka Kerja Kebijakan Publik	209
G. Proses Kebijakan Publik.....	210
BAB 10 PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DAN MODEL REFORMASI BIROKRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	211
A. Pelaksanaan Pelayanan Publik.....	211
B. Implementasi Kebijakan.....	217
C. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dan Model Reformasi Birokrasi Pada Instansi Pemerintah Daerah.....	225
D. Pengertian Birokrasi.....	234
E. Daftar Pustaka	240
BAB 11 PARTISIPASI DAN KOLABORASI PUBLIK DALAM DIGITAL GOVERNMENT	241
A. Kolaborasi Publik dalam <i>Digital Government</i>	241
B. Tata Kelola <i>Digital Government</i>	241
C. Business Case Penerapan <i>Digital Government</i>	242
D. Keamanan Informasi pada <i>Digital Government</i>	242
E. Strategi Pengembangan Digital Government.....	243
F. Pemerintah adalah “ <i>Public Servant</i> ”	243
1. <i>Government Function Network</i>	250
2. <i>Index e-government</i>	253
3. <i>Best Practices</i>	258
G. Daftar Pustaka	261
TENTANG PENULIS.....	262

BAB 1 | PERENCANAAN STRATEGIK

A. Rencana Strategik

Perencanaan strategik sangat diperlukan oleh hampir semua organisasi formal, terutama organisasi pemerintahan. Perencanaan strategik organisasi pemerintahan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar berbagai perwujudan visi dan misi serta strategi organisasi pemerintahan.

Rencana strategik yang dihasilkan dari proses perencanaan strategik berfungsi untuk “menuntun” manajer/pimpinan dan karyawan organisasi dalam mencapai kinerja strategik atau untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Makalah ini membahas konsep perencanaan strategik instansi pemerintah dan mencoba untuk mengimplementasikan pada organisasi publik atau pemerintahan. Pembahasan dimulai dari konsep dan arti pentingnya perencanaan strategik, dilanjutkan dengan sistematika perencanaan strategik sampai dengan pengendaliannya melalui pengukuran dan penilaian kinerja.

dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa mendatang dengan *Recognized* dan *responsed* oleh semua *stakeholdernya*.

Percanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik yakni *top-down* dan *bottom-up approach*.

Dengan penentuan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, instansi pemerintah telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya.

Penyusunan perencanaan strategik membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen organisasi pemerintah baik di pusat maupun didaerah terutama dalam era otonomi daerah agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Memperhatikan GBHN dan kebijaksanaan strategik nasional adalah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan strategik.

F. Daftar Pustaka

- Basri, Faisal H, (2000), *Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan Pada Seminar Nasional Strategi Bisnis Menghadapi Otonomi Daerah, diselenggarakan oleh Forum Dewan PWI Malang, 3 Juni.
- Mulyadi dan Johny Setyawan (1999), *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Nawawi, Hadari H, (2000), *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syaukani H, Afan Gafar, Ryaas Rasyid, (2002), *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB 2

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN PEMANFAATAN ELECTRONIC GOVERNMENT

A. Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat (Rasyid, 2007:13).

Menurut Surbakti (1992:167), pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu *kubernan* atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan. Sedang memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata "Perintah", yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik.

F. Daftar Pustaka

- Bastian, Indra 2014 Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik Jakarta: Salemba Empat.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibty, Idham et.al (eds). 2002. Good Governance dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: PKPEK dengan Forkoma-MAP, UGM.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. e-Government in Action. Yogyakarta: Andi
- Prasojo, Eko, dkk. 2006. Kinerja Pelayanan Publik: Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja, Keterlibatan dan Partisipasi Dalam Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kependudukan. Jakarta: Yappika.
- Sarundajang, S.H. 2005. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah: upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (kepemerintahan yang baik). Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 3, Cetakan 1. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2008. Produktivitas Apa dan Bagaimana. Jakarta: PT Bina Akasara.
- Sobirin, Achmad. 2007. Budaya Organisasi. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif

BAB 3 | PEMERINTAH DIGITAL

A. E-Government

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris 2020-09-23 di Wayback Machine. electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris 2020-09-23 di Wayback Machine. electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan

tersebut sehingga dikhawatirkan adanya kepentingan pribadi/kelompok atas keengganannya tersebut.

E. Kendala E-Government

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik baik di pusat maupun daerah yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Terutama pada institusi pusat dengan unit pelaksana teknisnya dan juga dengan institusi lain dengan item pelayanan yang sama (G2G= government to Government). Dengan kata lain hal ini belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing sektor.

F. Daftar Pustaka

SerambiNews.com dengan judul Pelayanan Publik Menurut Islam, <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam>.

1. <http://underground-paper.blogspot.com/2013/04/implikasi-penerapan-e-government.html>
2. ["Sahkan RUU Administrasi Pemerintahan, Priyo Sentil Kepala Daerah dan Revolusi Mental"](#)
3. ["LAPAN turut Uji Publik RUU E-Government"](#)
4. ["Naskah Akademik RUU E-Gov" \(PDF\)](#). Diarsipkan dari [versi asli \(PDF\)](#) tanggal 2016-08-07. Diakses tanggal 2016-06-08.

BAB 4

MEMAHAMI KONSEP E-GOVERNANCE SERTA HUBUNGANNYA DENGAN E-GOVERNMENT DAN E-DEMOKRAS, PENERAPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH

A. E-Governance dan Governance

E-Governance terdiri dari dua elemen penting yaitu 'governance' sebagai konsep utama dan 'electronic' atau ICTs (Information and Communication Technologies) sebagai alat untuk meningkatkan proses governance. Konsep governance berkembang sejak tahun 1980-an (Bevier,2007:364), sedangkan konsep e-Government pertamakali berkembang di Amerika pada tahun 1993 (Gronlund,2007:364), sementara konsep penggunaan internet dalam government mulai diidentifikasi sejak 1970-an (Gronlund,2007:364). Sejalan dengan berkembangannya konsep governance dan perkembangan ICTs berkembang pula konsep e-Governance, seiring dengan itu pula konsep e-Government dan e-Governance menjadi tumpang tindih. e-Governance seringkali didefinisikan sangat sederhana mirip dengan e-Government yaitu bagaimana pemerintah menggunakan ICTs untuk meningkatkan efisien terutama pada pelayanan publik. Kebanyakan penelitian e-Governance terkonsentrasi pada sektor publik, padahal konsep governance sesungguhnya yaitu terdiri dari banyak sektor, yang saling berhubungan dalam berbagai level/tingkat governance. Belakangan konsep e-Government terus berkembang, dengan menambahkan makna meningkatkan proses demokrasi, sehingga pendefinsian e- Government menjadi tumpang tindih pula dengan konsep e-Demokrasi. Pada dasarnya problema ini dikarenakan ketidakjelasan atas pemahaman konsep 'governance' sebagai konsep utama pada e-Goverannce.

pelayanan publik) secara simultan berkorelasi antar level governance baik lokal, nasional, regional maupun global. Sehingga konsep governance bersifat multi aktor, multi level serta multi arah dalam transfer wewenang. Dengan demikian e-Governance didefinisikan sebagai penggunaan ICTs pada proses governance/kepemerintahan yang multi aktor, multi level dan multi arah dalam dimensi horisontal dan vertikal.

Sedangkan hubungan antara ketiga konsep: e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi adalah: pertama, e-Government merupakan salah satu komponen dari e-Governance karena government merupakan salah satu sektor dalam proses governance. Kedua, e-Demokrasi adalah salah satu komponen dari e-Governance, karena demokrasi merupakan aspek penting dalam proses governance. Terakhir penulis juga menarik argumentasi bahwa salah satu tujuan e-Government adalah e-Demokrasi, atau e-Government merupakan platform untuk e- Demokrasi.

P. Daftar Pustaka

- Anttiroiko, Ari-Veikko (2004), *Introduction to Democratic e-Governance*, pada: Matti, Malkia, Ari-Veikko Anttiroiko and Reijo Savolainen (eds.), *e-transformation in Governance: New Directions in Government and Politics*, Hershey: Idea Group Publishing.
- Bevier, Mark (2007), *Governance*, pada: Bevier, Mark (ed.), *Encyclopedia of Governance*, Vol. I, Los Angeles: Sage Publication.
- Gronlund, Ake (2007), *Electronic Government*, pada: Anttiroiko, Ari-Veikko and Matti Malkia (eds.), *Encyclopedia of Digital Government*, Volume I, Hershey: Idea Group Reference.
- Norris, Donald F. (2007), *Electronic Democracy at the American Grassroots*, pada: Norris, Donald F. (ed.), *Current Issues and Trends in E-Government Research*, Hershey: Cyber Tech Publishing.
- Norris, Pippa (2001), *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*,

BAB 5

ASPEK PEMERINTAHAN DAN PERUBAHAN KOMPREHENSIF ERA DIGITAL

A. Aspek Pemerintahan di Era Digital

Era digital yang ditandai dengan penggunaan teknologi internet yang sangat masif saat ini menimbulkan perubahan yang tidak terduga dan sulit ditebak arahnya. Para ahli mengatakan terjadi “gangguan” (disruption) pada kehidupan umat manusia. Perubahan yang terjadi berangkat dari pemikiran orang atau orang-orang. Oleh karena itu, Shaw mengingatkan bahwa “Those who cannot change their minds cannot change anything.” Mereka yang tidak dapat mengubah pola pikirnya tidak akan dapat mengubah apa pun karena perubahan diawali dari perubahan cara berpikir.

Menurut Khasali ada sepuluh karakteristik perubahan, yaitu 1) Sifatnya misterius, sulit untuk dipegang; 2) Perubahan memerlukan aktor pengubah (change makers); 3) Tidak semua orang dapat diajak melihat perubahan; 4) Perubahan terjadi setiap saat; 5) Ada sisi keras (hardware) dan ada sisi lembut (software) dari perubahan; 6) Perubahan membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan; 7) Diperlukan upaya-upaya khusus untuk menyentuh nilai-nilai dasar organisasi (budaya korporat); 8) Perubahan banyak diwarnai oleh mitos-mitos; 9) Perubahan menimbulkan ekspektasi; 10) Perubahan selalu menakutkan dan menimbulkan kepanikan.

Sebuah perubahan tidak muncul tiba-tiba, tetapi selalu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan serta dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang bersifat acak seperti perubahan iklim maupun faktor yang bersifat sistematis – dalam bentuk perubahan yang direncanakan. Perubahan

masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan partisipasi) pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu.

F. Daftar Pustaka

- Wasistiono, Sadu. (2019). "Aspek Pemerintahan dan Perubahan Komprehensif Era Digital." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja (Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN)* 45: 1-16. Bandung, Indonesia.
- Acemoglu, Daron and James A Robinson; 2012. *Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*; Crown Publishing Group; USA.
- Al Gore; 2013. *The Future*; The Random House Publishing Group; New York.
- Arief Budiman; *Kolom Pakar : Industri 4.0 vs Society 5.0*; Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada; dimuat tanggal 11 Februari 2019; diunduh tanggal 23 April 2019.
- Bappenas. *Visi Indonesia 2045*. Paparan disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada acara Sosialisasi Visi Indonesia 2045 di Jakarta, 8 Januari 2019.
- Drucker, Peter F; 1993. *Management : Task, Responsibilities, Practices*; Harper Business Publishers.
- Drucker, Peter F; 1995. *People and Performance : The Best of Peter Drucker on Management*; by Routledge.
- Drucker, Peter F; 2007. *Management Challenges for the 21st Century*; Routledge.
- Fukuyama, Mayumi; *Japan SPOTLIGHT - July/August 2018*; dikutip dari <http://www.jef.or.jp/journal>.
- Garuda Sugardo; *Sumedang CITIoT, Tim Pelaksana Sumedang Toward to IOT CITY Sumedang*, 14 Maret 2019. Hal 7.

BAB 6

MODEL KEPEMIMPINAN DIGITAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

A. Kepemimpinan

Apa itu kepemimpinan Menurut Susan Ward dalam *Leadership Definition: What Is Leadership? And Can You Learn to Be a Good Leader?* (2019), definisi sederhananya adalah bahwa kepemimpinan adalah seni memotivasi sekelompok orang untuk bertindak menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam lingkungan bisnis, ini bisa berarti mengarahkan pekerja dan kolega dengan strategi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dalam dunia militer, dapat diartikan mengarahkan anggota untuk keberhasilan tugas.

Definisi kepemimpinan ini mencakup hal-hal penting yang dapat menginspirasi orang lain dan bersiap melakukannya. Kepemimpinan efektif adalah didasarkan pada ide-ide (baik yang asli atau yang dipinjam), tetapi ide itu tidak akan terwujud tanpa dikomunikasikan kepada orang lain dengan cara melibatkan mereka untuk bertindak sebagaimana pemimpin inginkan. Sederhananya, pemimpin adalah inspirasi dan pengarah aksi. Dia adalah orang dalam kelompok yang memiliki kombinasi kepribadian dan keterampilan kepemimpinan yang membuat orang lain ingin mengikuti arahnya.

Kepemimpinan adalah topik yang kompleks dan dapat dipelajari dengan berbagai cara yang membutuhkan definisi yang berbeda. Manajer adalah orang yang memiliki jabatan dan wewenang formal. Seorang pemimpin adalah mungkin seorang manajer atau bukan, tetapi dapat mempengaruhi orang lain. Menjadi pemimpin yang memegang posisi formal

E Daftar Pustaka

Buku

- Bartodziej, Jan, Christoph, (2017). *The Concept Industry 4.0 An Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production Logistics*, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Berlin, Germany.
- Boesenberg, Christina, (2019). *7 Characteristics of Leadership 4.0 – What successful leaders do differently*, Global Leadership Consultants, Oxford Leadership.
- Ferguson, (2009). *Leadership Skills*, Third Edition, Infobase Publishing, NewYork.
- Kelly, Richard, (2019). *Constructing Leadership 4.0: Swarm Leadership and the Fourth Industrial Revolution*, Palgrave Macmillan, Springer Nature, Switzerland.
- Oberer, Birgit And Erkollar, Alptekin, (2018). *Leadership 4.0: Digital Leaders in The Age of Industry 4.0*, International Journal of Organizational Leadership, www.aimijournal.com
- Scherr, Allan L. and Jensen, Michael C., (2007). *A New Model of Leadership*, Harvard NOM Research Paper No. 06-10, Barbados Group Working Paper No. 06-02.
- Topping, Peter A., (2002). *Managerial Leadership - The McGraw-Hill Executive Mba Series*, McGraw-Hill, New York.
- Ustundag, Alp and Cevikcan, Emre, (2018). *Industry 4.0: Managing the Digital Transformation*, Springer International PublishingSwitzerland.
- Wolf, Jeff, (2015). *6 Essential Leadership Responsibilities that Build Effective Teams*, Wolf Management Consultants, LLC.
- Yoong, Pak, (2010). *Leadership in the Digital Enterprise: Issues and Challenges*, Business science reference, Hershey, New York.

BAB 7

KONSEP PELAYANAN PUBLIK MENURUT ISLAM

A. Pelayanan Publik

Menurut Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyri ISLAM bukan hanya *ad-din* (agama), bukan juga millah (ideologi) semata, tetapi Islam bagian dari sistem (manhaj) dan pandangan hidup (*way of life*) bagi segenap umat manusia. Syariat Islam merupakan kosmologi kehidupan yang mengatur bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan Tuhan mereka, namun juga mampu menjadi insan yang siap mendedikasikan diri sebaik mungkin kepada orang lain. Syariat Islam sebagaimana dijelaskan Abubakar (2008: 2) adalah tuntutan, bimbingan, dan aturan Allah, baik prinsip-prinsip maupun lainnya guna memandu perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Ajarannya tak terbatas dalam hal privat, melainkan juga meliputi sektor publik. Dari persoalan yang sepele hingga yang paling rumit.

Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri sehingga lebih mementingkan hajat profan semata, tetapi hakikat kehidupan adalah menjadi abdi yang dapat berguna sebanyak-banyaknya bagi orang lain sebagai bentuk manifestasi khaira ummah (umat yang terbaik). “Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” Demikianlah sabda Nabi Junjungan Alam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Penggalan hadis tersebut menyiratkan makna yang sangat mendalam dan utopis bahwa senang atau tidak, berat

perintah Allah Swt. bukanlah ibadah dan akan mendapat dosa. Segala yang pekerjaan harus dimulai dengan niat, karena niat itu adalah kata hati. Kata hati tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Setiap perbuatan yang kita lakukan adalah dengan niat, apabila niat baik akan melahirkan perbuatan yang baik dan apabila niat buruk akan melahirkan perbuatan buruk pula. Pada setiap jiwa manusia ada pengawas yang tidak dapat dilihat dengan mata yaitu Rakib dan Atid. Malaikat ini duduk disebelah kanan dan kiri manusia. Mereka berdua adalah pengawas setiap perbuatan manusia. Baik akan dicatat baik dan buruk akan dicatat buruk.

Daftar Pustaka

- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tahun 2003.
Dr. Lijan Poltak Sinambela, MM., M.Pd., dkk. (2007), Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, (PT. Bimu Aksara: Jakarta), Cet.II, hlm. 5
- Drs. Hassel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, (2005), Manajemen Publik, (Gramedia WidiasaranaIndonesia: Jakarta), hlm. 208.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Putra, Sianipar.(1998), Membina Sikap Mental Wirausaha, (Gunung Jati): Jakarta, hlm. 4.
- Lan.Tap.Menpan, No.63, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tahun 2003.Keputusan Menpan Nomor : 81 Tahun 1993.
- Moenir, H.A.S, (2001), Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 88.
- Kartasasmita, (1997), Administrasi Pembangunan, Jakarta, Pustaka LP3ES, hlm. .27
- Departemen Agama RI, al-Qur-an dan Terjemahnya, hlm. 298
- Departemen Agama RI, hlm, 780
- Kridawati Sadhana, M.S. dkk. (2004), Etika Birokrasi, UNMER d/h. IKIP MALANG, hlm..34.
- Gilman, C.S. dan Lewis, C.W. (1996), .Public Service Ethics, A Global Dialogue, University ofConnecticut USA, hlm. 68
- Gilman, C.S. dan Lewis, C.W. (1996),...hlm. 72

BAB 8

PENYIAPAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

A. Kualitas Pelayanan Publik

Isu peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan isu yang hangat dibicarakan dewasa ini. Pelayanan publik erat kaitannya dengan fungsi pemerintahan dalam rangka pemberdayaan atau pendidikan sosial kepada masyarakat, dan merupakan tanggung jawab semua unsur yang terpadu dengan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Di negara-negara sedang berkembang, pelayanan publik sangat dominan dilakukan oleh aparatur pemerintah. Sebagaimana salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat maka pemerintah sering juga disebut pelayanan masyarakat (*public service*).

Kondisi empirik yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya beberapa masalah aktual yang telah terjadi, antara lain semakin rendahnya kualitas pelayanan, tidak jelasnya standard pelayanan dan rendahnya akuntabilitas pelayanan yang ditandai dengan tidak adanya transparansi dalam pelayanan baik dari aspek biaya, waktu dan kualitas pelayanan (Suwandi, 2002 : 30).

Di sisi lain, masyarakat semakin intens mengajukan tuntutan untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah. Sebagai *stakeholders* (pemegang saham), masyarakat juga menuntut agar supaya dilibatkan dalam penentuan standard kualitas dan kualitas pelayanan. Di samping itu, sebagai *customer* sekaligus *citizen*, masyarakat

E. Kesimpulan

Otonomi daerah telah dijalankan dan ini berarti tantangan sekaligus peluang terutama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Faktor sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah daerah memegang peran yang strategis karena mereka adalah pelaksana fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Pembinaan kepegawaian pemerintah daerah dilakukan untuk mempersiapkan sekaligus menghasilkan aparatur pemerintah daerah yang profesional dalam melayani masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, artinya yang berkualitas dan memuaskan pelanggan. Disinilah peran strategis sumber daya aparatur pemerintahan daerah sebagai faktor yang menentukan tercapainya tujuan organisasi, di mana profesionalismenya tercermin dalam pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan standard pelayanan yang memuaskan pelanggan (masyarakat).

Pada akhirnya, dengan mengutip pendapat *Rasyid* (2000), maka perlu dikemukakan di sini bahwa aparatur yang baik adalah yang bisa memberi kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan, bahkan sebelum masyarakat itu sendiri memintanya. Inilah tantangan bagi para PNS baik di pusat maupun di daerah untuk bisa berkarya bagi keberhasilan bangsa ini.

F. Daftar Pustaka

- Kaho, Josef Riwo, (1997) *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lukman, Sampara, (1999), *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA-LAN Press.
- Moekijat, (2002), *Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia*, Bandung : Moekijat Press.
- Moenir, A.S., (2001), *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 9 | DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

A. Konsep dan Makna Kebijakan

Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Budi Winarno¹ dan Sholichin Abdul Wahab² sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para *policy makers* (pembuat kebijakan).

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 1-2. Dalam hal ini Solichin rupanya tidak membedakan antara kebijaksanaan dan kebijakan, atau bahkan barangkali baginya kebijakan itulah terjemahan dari *wisdom*. orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*). Setiap definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula.

Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.³ Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt

BAB 10

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DAN MODEL REFORMASI BIROKRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

A. Pelaksanaan Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan suatu yang melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Adapun pengertian dari pelayanan tersebut menurut Gronroos dalam Ratminto (2005:2), bahwa: “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.”

Pelayanan merupakan suatu yang melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Adapun pengertian dari pelayanan tersebut menurut Ratminto (2005:2) “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.”

Dari pengertian pelayanan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan umum tentang ciri-ciri pelayanan yaitu:

1. Sesuatu yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba)
2. Usaha yang melibatkan upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan organisasi penyelenggara pelayanan.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Hegel, G.W.F., 2009, *Filsafat Sejarah*, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putro, Widodo Dwi., 2011, *Kritik Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, Satjipto., 2009, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya, Bernard L., dkk, 2010, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wasistiono, S., 2001, *Kapita Selekta Manajeme Pemerintahan Daerah*, Alqaprint Jatinangor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

BAB 11

PARTISIPASI DAN KOLABORASI PUBLIK DALAM DIGITAL GOVERNMENT

A. Kolaborasi Publik dalam *Digital Government*

Digital Government merupakan upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital dan mengintegrasikannya di dalam sektor publik. Di tengah perkembangan teknologi yang masif seperti cloud computing, social media, mobile technology, memberikan peluang bagi pemerintah dalam melayani publik serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan layanan publik akan mengubah ekspektasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Paradigma pemerintah terhadap layanan publik telah bergeser dari mengantisipasi kebutuhan bisnis masyarakat (citizen- centric approach) ke menyesuaikan kebutuhan bisnis masyarakat melalui kemitraan dengan pemerintah (citizen-driven approach). Untuk itu, perlu dipastikan bahwa Digital Government bukan hanya sebatas melakukan digitalisasi layanan publik, tapi juga harus dapat diintegrasikan dengan proses bisnis dalam pelayanan publik.

B. Tata Kelola *Digital Government*

Organisasi dan tata kelola Digital Government diperlukan agar penerapan Digital Government dapat dilakukan secara terencana, terkoordinir, dan terukur. Perlu diidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab dalam mengkoordinir penerapan strategi Digital Government. Selain itu, juga harus dilakukan perencanaan serta pemantauan serta

TENTANG PENULIS



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (*International Jurnal of Social Science Humanities Research*, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency*, (*IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research*, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia*, (*East African Scholar Journal of Economics, business and Management*, 2019); *Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand*, (*International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus)*, 2020); *Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia*, (*Journal L Sociale*, 2020); *Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency*, (*Journal La Bisecoman*, 2020); *Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports*, (*South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences*, 2020); *Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia*, (*East African Scholar Journal of Education and Literature*, 2020); *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets*, (*Journal La Sociale*, 2020); *The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare*, (*International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus)*, 2020); *Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex*, (*Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS)*, 2020); *Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective*, (*IAR Journal of Humanities and Social Sciences*, 2020); *Village Fund*

Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises, (Artech Journal of Current Business and Financial Affairs (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service through Digital Technology-based Licensing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). - Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rule <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa>, 2021)

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermediate One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermediate Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement Break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Blacklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun

2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality

Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer (TOT) Internasional* di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research (CIQnR)* di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research (CIQaR)* di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, *Personal Expert Consultant* KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert

Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, [juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.](#)

Makassar, 18. September 2021
Hormat Kami,



A.Junaedi Karso



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202201774, 7 Januari 2022

Pencipta

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si**

Alamat : Dusun Kebon Randu, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indramayu, JAWA BARAT, 45256

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si**

Alamat : Dusun Kebon Randu, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indramayu, JAWA BARAT, 45256

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Perencanaan Strategik Dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digital 4.0**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Januari 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000316982

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



...an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
...b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.